

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAERAH (SIMDA) UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**ERMAWATI**

**105730 4835 14**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAERAH (SIMDA) UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
Ermawati  
NIM 105730483514

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta, adikku tersayang yang telah menyayangiku sepenuh hati, telah memberikan semangat dan doa restu terindah untukku serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan.

## MOTTO

“Waktu dan tenaga yang telah Anda habiskan untuk belajar, pasti akan selalu melahirkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan Anda”

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhan-mulah yang maha mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”*

*(QS. Az Alaq : 1-5)*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : ERMAWATI  
No. Stambuk/ NIM : 10573 04835 14  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

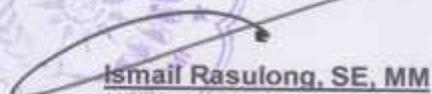
  
Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NIDN : 0902116603

Pembimbing II

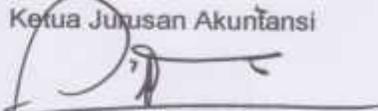
  
Hj. Muchriana Muchran, SE., M.Si., AK., CA  
NIDN : 0930098801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP  
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

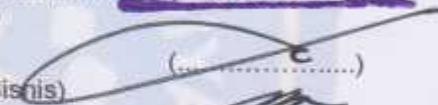
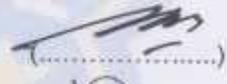
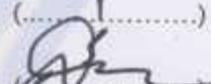
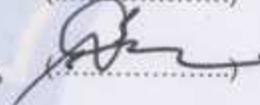
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama ERMAWATI, NIM 105730483514, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., MM   
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si., Ak.CA   
3. Muttiarni, SE., M.Si   
4. Muh. Nur R, SE., MM 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ermawati  
Stambuk : 10573 04835 14  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP  
NBM : 107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana ( S1 ) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua bapak dan ibu yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi. Dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr.H Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak IsmailBadollahi, SE,M.Si.,Ak.CA.,.CSP selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak, selaku Pembimbing I Dr. Andi Jam'an, SE.,M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu, selaku Pembimbing II Muchriana Muchran,SE.,M.Si.Ak.CA yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian akhir.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi 5 Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilul Haq, Fastaqbiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2018

**Penulis**

## **ABSTRAK**

ERMAWATI, Tahun 2018 Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Jam'an dan Pembimbing II Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar telah dijalankan secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diketahui efektifitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan telah berjalan sangat efektif. Dapat dilihat dari pegawai BPKAD Kota Makassar sudah memahami makna SIMDA Keuangan secara umum. SIMDA Keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumberdaya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : SIMDA Keuangan, Pengelolaan Keuangan.

## **ABSTRACT**

*ERMAWATI, 2018 Effectiveness of Implementation of Regional Management Information System (SIMDA) for Financial Management at Makassar City Government, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Andi Jam'an Advisor II Muchriana Muchran.*

*This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Regional Management Information System (SIMDA) for Financial Management at the Government of Makassar.*

*The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques such as observation, interview, and documentation study.*

*The research findings show that the effectiveness of the implementation of Regional Management Information System (SIMDA) Finance has been very effective. Can be seen from the staff of BPKAD Makassar City has understood the meaning of SIMDA Finance in general. SIMDA Finance facilitates the process of preparing financial statements. Factors that have to support the implementation of the implementation of financial SIMDA is communication, human resources, attitude / disposition and bureaucratic structure.*

**Keywords :** *SIMDA Finance, Financial Management.*

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Tinjauan Teori.....	5
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen .....	5
2. Manfaat dan Kualitas Informasi .....	6

3. Proses Sistem Informasi Manajemen (SIM) .....	8
4. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	9
5. Aplikasi SIMDA Keuangan .....	12
6. Teori Implementasi Kebijakan .....	20
B. Tinjauan Empiris .....	24
C. Kerangka Konsep .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Fokus Penelitian .....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Teknik Analisis.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	34
1. Profil BPKAD Kota Makassar .....	34
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	46
1. Pemahaman Makna SIMDA Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan.....	46
2. Faktor-faktor Pendukung yang Dimiliki oleh BPKAD Kota Makassar dalam Penerapan SIMDA Keuangan .....	48
3. Kualitas Infomasi yang Dihasilkan dari Penerapan SIMDA	

Keuangan.....	54
4. Efektifitas Penerapan SIMDA Keuangan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	30

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Berdasarkan Golongan.....	45
Gambar 4.2 Berdasarkan Pendidikan .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Efektivitas penerapan system informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah.

Salah satu bentuk teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk system informasi terkomputerisasi yang disebut system informasi manajemen daerah

(SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu system informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.

Alasan meneliti di Pemerintah Kota Makassar bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena Pemerintah Kota Makassar sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau penyusunan menggunakan Microsoft Excel. Tujuan dari Penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan SIMDA Keuangan maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. **"Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Makassar"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Makassar telah dijalankan secara efektif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Makassar telah dijalankan secara efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat teoritis.**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu berupa teori efektifitas penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan pada kota makassar. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana penerapan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan apakah sudah dijalankan secara efektif.

## 2. Manfaat praktis.

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada praktisi khususnya para staff atau pegawai pengelola keuangan, yaitu untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen daerah untuk pengelolaan keuangan di jalankan secara efektif. Bagi pihak lain, penelitian ini akan menjadi bahan referensi terkait dengan konsep efektifitas penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk pengelolaan keuangan pada pemerintah kota makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Azhar Susanto (2013:22) sistem adalah “kumpulan dari sub bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Sutarman (2012:14) mendefinisikan informasi sebagai “sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”. Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2010:58) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.

Menurut Raymod Mc Leod (2010:11) “Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan”. Menurut Raymod Mc Leod (2014: 94-95) “Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi pada masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika.

Informasi digunakan oleh pengelola ataupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah". Menurut Bambang Hartono (2013:20) "Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan".

Menurut Rochaety, dkk (2012) "Sistem Informasi Manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan". Machud, Rizan (2013) Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

## **2. Manfaat dan Kualitas Informasi**

### **a) Manfaat Informasi**

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri adalah :

#### **a. Menambah pengetahuan**

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

b. Mengurangi ketidak pastian pemakai informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.

c. Mengurangi risiko kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.

e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

**b) Kualitas Informasi**

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Agus Mulyanto (2010) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam karakteristik, yaitu :

a. Akurasi (*accuracy*)

Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi dikatakan akurasi yaitu informasi harus jelas mencerminkan maksud yang disampaikan dan harus bebas dari kesalahan-kesalahan.

Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidak akuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi atau data mengalami

gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut.

b. Ketepatan waktu (*timelines*)

Menurut Agus Mulyanto (2010) informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal bagi organisasi.

c. Relevan (*relevance*)

Menurut Agus Mulyanto (2010) Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya.

Jogiyanto (2009:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (*uniqueness*), ketepatan (*conciseness*), kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan (*read ability*).

### 3. Proses Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sebuah sistem membutuhkan sebuah proses untuk menjalankannya, begitu pula Sistem Informasi Manajemen, berikut bagaimana proses SIM dilakukan. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas :

1. Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus

diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.

3. Pengambilan keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih.

#### **4. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu system informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu system dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Menurut Darea (2015) SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintah, peayanan masyarakat, dan memfasilitas partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi

terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

**a) Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governemen; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good government.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan

c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:

1. Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
2. Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

**b) Klasifikasi SIMDA**

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masingmsing dinas/ lembaga.

**c) Unsur SIMDA**

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur yaitu :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;

- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

#### **5. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan**

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. (Mitami, 2013).

##### **a) Perkembangan SIMDA Keuangan**

SIMDA Keuangan mengalami tiga tahapan perubahan, yaitu :

###### **a. SIMDA Ver. 1.0**

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini

dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil diaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah.

b. SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai di aplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem Ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

c. SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling update yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

d. SIMDA Ver 2.7

Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Ver 2.7 berbasis accrual antara lain, PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan PMK 238, PMK 05 2011 tentang pusat. Permendagri no 64 tahun 2013 tentang pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemda output aplikasi antara lain APBD beserta perubahannya, SPM, SP2D, Jurnal transaksi accrual, Buku besar, Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Arus Kas, serta pertanggungjawaban. mekanisme dan output penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada permendagri 13 tahun 2006 No59 tahun 2007, No 55, No 21 dan seterusnya proses dan output akuntansi berpedoman pada PP 71 Tahun 2010, PMK 238 tahun 2011 dan permendagri No 64 tahun 2013 aplikasi ini didukung dengan pedoman penyusunan perkada kebijakan akuntansi dan sistim akuntansi pemda berbasis aplikasi SIMDA accrual.

**b) Output yang dihasilkan**

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran
  - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
  - c. Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM);

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. Surat Tanda Setoran (STS);
  - e. Register; dan
  - f. Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
- a. Jurnal;
  - b. Buku besar;
  - c. Buku pembantu;
  - d. Laporan realisasi anggaran;
  - e. Laporan arus kas; dan
  - f. Neraca.
4. Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan :
- a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran;
  - b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan;
  - c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan;  
dan
  - d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan.

**c) Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan**

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawabannya);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;

4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

**d) Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan**

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan

daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## 2. Kestinambungan Maintenance

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

## 3. Transfer of Knowledge

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan "satu kali untuk selamanya."

## 4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

### **e) Pembiayaan Penerapan SIMDA Keuangan**

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasilainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasangprogram tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

**f) Sumber Daya Manusia**

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah

daerah mengerahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi.

Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA Keuangan bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **6. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan” (Agustino 2008:195). Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (2010), terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni: Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, hubungan antar organisasi. Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi. Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan. Keenam, Disposisi implementor.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edward (2014:62-70) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resource*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)”. Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

#### **a) Komunikasi**

Menurut Edward (2014:62) komunikasi merupakan faktor yang menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor

mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sumber informasi yang berbeda dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah sebuah implementasi dapat terlaksana.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya implementor tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan bingung dengan apa yang akan dilakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

#### **b) Sumber Daya Manusia**

Menurut Edward (2014:66) sumber daya yang penting melalui staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, serta cukup untuk menerapkan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan

kebijakan, adanya wewenang yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (Jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk melakukan penerapan kebijakan. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Informasi merupakan sumber daya lainnya yang penting bagi pelaksana kebijakan. Terdapat dua bentuk informasi, yaitu :

- a. Informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan
- b. Informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Selain SDM dan informasi, sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor serta fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan seperti kantor, dan peralatan.

**c) Disposisi atau Sikap**

Menurut Edward (2014:68) Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka sebuah kebijakan akan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

**d) Struktur Birokrasi**

Menurut Edward (2014:70) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **B. Tinjauan Empiris**

Penelitian yang dilakukan **Erwin** (2016), dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Diwilayah Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis yang digunakan adalah Regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel Penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang disebabkan yakni kondisi Kompetensi aparatur yang masih rendah karena tidak berlatarbelakang akuntansi, Pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti

transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang di lakukan **Natalia Deisi Lumintang** (2015), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Badan pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) pemerintah kota Manado, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh BPK-BMD kota manado sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai BPK-BMD kotamanado yaitu pegawai bagian perbendaharaan, pegawai bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan dan Kepala badan Metode analisi yang digunakan adalah deskriptif . Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai BPK-BMD Manado sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, Sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian yang di lakukan **P.Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sri Harta Mimba** (2014), dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta pengaruhnya

terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil yang di peroleh dalam dari penelitian ini menunjukkantingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Penelitian yang di lakukan **Nur Ulfiati** (2017), dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh impelemtasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :1) implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, 2) kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, 3) penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal.

Penelitian yang di lakukan **Halens Ryanlie Ole** (2014), dengan judul Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemtasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA), terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : proses penggunaan SIMDA telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian yang di lakukan **Yogi Hertanto, Tjahjamulin Domai, dan Fadillah Amin** (2017), dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah di Kabupaten Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) pada badan pengelolaan keuangan dan aset darah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : kualitas penerapan SIMDA Keuangan terhadap pelaporan keuangan di BPKD Kabupaten Blitar berjalan secara efektif.

Penelitian yang di lakukan **Haryati Saleh Ramesa** (2015), dengan judul Analisis Faktor-faktor Pendukung dan Kualitas Informasi Penerapan Sistem Informasi Manjemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kendari sehingga mampu

menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. 2) untuk mengetahui kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKAD Kota Kendari untuk menerapkan SIMDA Keuangan secara optimal, adalah komunikasi yang aktif mengenai penerapan SIMDA Keuangan, Sumber Daya Manusia yang telah memadai sebagai implementor SIMDA Keuangan, Sikap/Disposisi yang mau menerima dan mengimplementasikan kebijakan penerapan SIMDA Keuangan, serta struktur birokrasi yang baik terksit dengan pengawasan atas jalannya aplikasi SIMDA Keuangan, 2) Dari beberapa karakteristik informasi yang baik diantaranya ketepatan waktu, akurat, dan relevan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Kendari sudah baik, karena terpenuhinya ketiga karakteristik kualitas informasi tersebut.

Penelitian yang di lakukan **Harmadhani Adi Nugraha dan Yuli Widi astuti** (2013), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sismds keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inter sitem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang di

peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : Aplikasi SIMDA keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi, dan ketetapan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual.

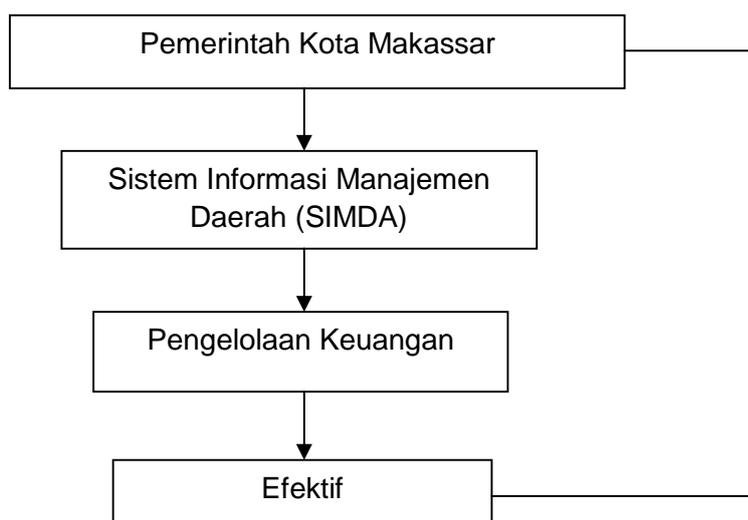
Penelitian yang di lakukan **Aulia Lorie Pangestika dan Yeni Priatma Sari** (2016), dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan SIMDA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Tegal. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : Laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dipahami oleh masyarakat, para wakil rakyat, investor dan pemerintah, dan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relevan, Andal dan dapat diperbandingkan, pada tahun 2008 sebelum diterapkannya SIMDA peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2008 dapat diterbitkan pada 23 januari tahun 2008 setelah adanya SIMDA pada tahun 2014 peraturan bupati untuk anggaran 2015 dapat diterbitkan pada 31 Desember 2014. Dan sistem informasi yang dihasilkan Sisten Informasi Manajemen Daerah berdasarkan hasil dengan pendekatan fenomologi adalah efektif.

Penelitian yang di lakukan **Mitami Dian M** (2013), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajmen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Pangkep, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh DPKAD Pangkep sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan, Serta Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : secara umum pegawai DPKAD pangkep sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaanya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untu mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang penerapan SIMDA Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan.

### C. Kerangka Konsep

**Gambar 2.1**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kota Makassar berjalan dengan efektif.

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada pegawai yang menggunakan aplikasi SIMDA. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah yaitu untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya SIMDA penyajian informasi pengelolaan keuangan sudah dijalankan secara efektif.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yaitu Kantor Wali Kota Makassar Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di jalan Admad Yani No.2 Makassar.

##### **b. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan selama 2 bulan, mulai tanggal 14 Mei s/d 12 Juli 2018.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau staff pengelola keuangan yang menggunakan aplikasi SIMDA.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi SIMDA.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Penelitian Lapangan (field Research)**

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh dengan secara:

1. Wawancara, merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab ”
2. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Tehnik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.
3. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen

sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

**b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembandingan dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, catatan kuliah, buku-buku serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

**F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini menjadi instrumen atau alat yang dipergunakan didalam menggali data yaitu efektifitas. Efektifitas adalah kemampuan menghasilkan output/hasil yang di inginkan. Ketika sesuatu yang dipandang efektif, maka hal tersebut dipandang akan memiliki hasil yang diharapkan.

**G. Teknis Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil BPKAD Kota Makassar**

Profil BPKAD Kota Makassar ini terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, struktur organisasi dan sumber daya manusia.

##### **1.1 Visi**

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset periode 2014-2019 Kota Makassar adalah “Mewujudkan APBD yang berkualitas menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019”.

##### **1.2 Misi**

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki Misi :

- a. Menciptakan kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan Akurasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- c. Meningkatkan Sistem Pengelolaan daerah menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- d. Meningkatkan pengelolaan keuangan milik daerah yang profesional dan modern.
- e. Meningkatkan sarana, prasarana, dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### 1.3 Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah serta tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Adapun tujuan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan keuangan yang taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah yang mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian hasil program

dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Pengelolaan keuangan yang ekonomis merupakan pengelolaan keuangan daerah dimana pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu padatingkat harga yang terendah.

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada prinsip keterbukaan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban pengelolaan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan adalah pengelolaan keuangan yang menunjukkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan / atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

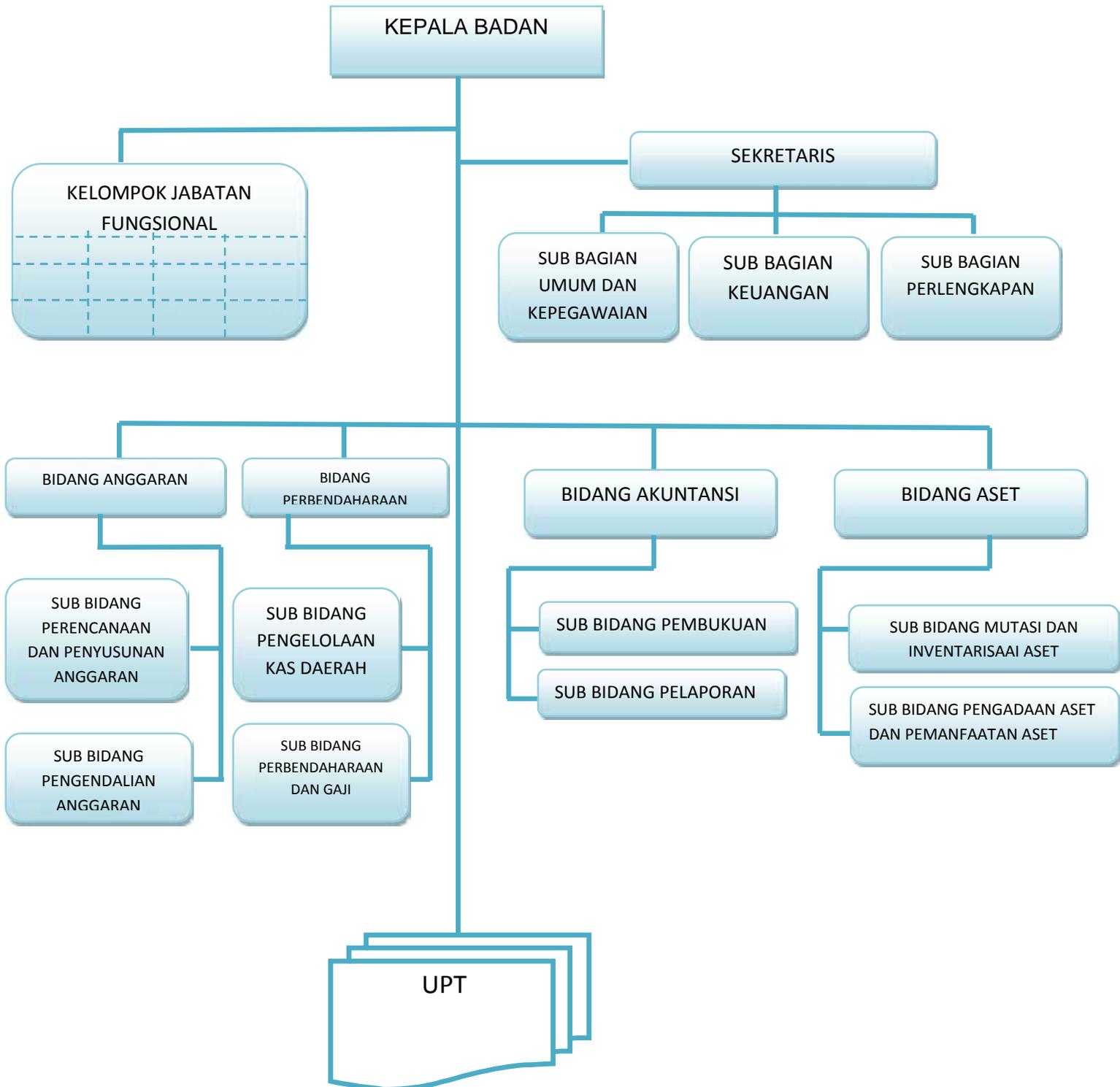
Pengelolaan keuangan yang memenuhi kepatuhan adalah pengelolaan keuangan daerah yang menekankan pada tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

#### 1.4 Strategi dan Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab pada perkembangan kedepan dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bersih , efektif, efisien, serta mampu berkomunikasi dengan SKPD lain, Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset melakukan penataan organisasi yang di fokuskan pada kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara pengkajian kebijakan penerima pendapatan daerah, perumsan kerangka ekonomi makro, perencanaan, dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan peranggungjawaban APBD, pembendarahan, pengurusan, dan penyimpanan barang miik daerah.

Pembagian kewenangan tersebut merupakan upaya penajaman tugas dan fungsi unit kerja agar tidak *overlapping*, menerapkan norma di bidang penataan organisasi, pembagian beban kerja yang seimbang mungkin antar unit kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan *stakeholder* dalam rangka mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab juga harus diikuti dengan penyesuaian kembali tata kerja unit-unit terkait di dalam Badan Pengelolan Keuangan dan Aset.

### 1.5 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

Sekretariat di pimpim oleh sekretaris terdiri atas 3 sub bidang yaitu :

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian,
- b) Sub bagian keuangan
- c) Sub perlengkapan

Secara umum tugas pokok sekertariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris menyelenggarakan fungsi :

- 1. Mengelolah Ketatausahaan Badan
- 2. Pelaksanaan Urusan kepegawaian Badan
- 3. Pelaksanaan Urusan keuangan Badan
- 4. Pelaksanaan Urusan Perlengkapan Badan
- 5. Pelaksanaan Urusan Umum dan Urusan Rumah Tangga Badan
- 6. Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas, badan anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Bidang Anggaran
3. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
4. Pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah
5. Penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya
6. Pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah
7. Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA SKPD
8. Penyusunan perencanaan anggaran kas dan menetapkan SPD
9. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran
10. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah
11. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan
2. Perumusan badan/data dan informasi untuk menyusun program pembangunan di bidang perbendaharaan
3. Pelaksanaan penerbitan SP2D
4. Pelaksanaan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang di tunjuk
5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
6. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah dan penempatan uang daerah
7. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
8. Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan
9. Penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah

10. Pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
  11. Pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi pemerintaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  12. Pengelolaan administrasi urusan tertentu
- e. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi memiliki tugas pokok penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah
3. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah
5. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
6. Melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah

7. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
  8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu
- f. Kepala Bidang Aset

Kepala bidang aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset. Dalam melaksanakan tugas, bidang aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset
2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang
3. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis,serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
4. Perumusan kebijakanteknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset
5. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah,penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, menyimpan seluruh bukti

asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensusbarang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali

6. Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa kendaraan, tanah, dan bangunan
7. Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaa tugas dengan SKPD terkait
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya
9. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

### 1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset. Data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar berjumlah 41 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	4	6	10
3.	Golongan III	13	13	26
4.	Golongan IV	3	1	4
Total		21	20	41

Tabel 4.2 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total Orang
1.	SD. SLTP	-	-	-
2.	SLTA	2	2	4
3.	Sarjana Muda/ D III	1	-	1
4.	Sarjana (S1)	11	12	23
5.	Master (S2)	7	6	13
6.	Doktor (S3)	-	-	-
Total		21	20	41

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian BPKAD

## **B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

### **1. Pemahaman Makna SIMDA Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan**

SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang di rancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Makassar telah mengerti/paham tentang makna dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan. Pendapat pegawai telah sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan secara umum yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu adapun tujuan penerapan SIMDA menurut pegawai yang telah diwawancarai yaitu tujuan SIMDA untuk memfasilitasi pegawai pemda untuk mengerjakan laporan keuangan lebih cepat dalam penyusunannya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai BPKAD Kota Makassar telah mengetahui secara umum tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan.

Program aplikasi SIMDA adalah program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerinah daerah dalam pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Menurut George C.Edward (2011: 90) sebuah implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan, konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Untuk memperoleh gambaran

pelaksanaan kerja SIMDA Keuangan dibutuhkan pemahaman pegawai yang lebih mendalam. Adapun hasil wawancara untuk menggambarkan proses pelaksanaan kerja SIMDA Keuangan untuk pengelolaan keuangan terkait mengenai proses penginputan data sampai dengan menghasilkan sebuah output.

Pengelolaan Keuangan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun Input dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA Keuangan yaitu berupa jurnal (input) yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan dan adapun (output) yang dihasilkan yaitu berupa RKA (rencana kerja anggaran), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (surat penyedia dana). Data ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan jadi mudah karena hanya menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang di inginkan. Ungkapan hasil wawancara membuktikan bahwa pegawai BPKAD Kota Makassar telah memahami proses pelaksanaan SIMDA Keuangan yang berkaitan dengan input dan output data yang dihasilkan.

Secara umum pegawai pada BPKAD Kota Makassar telah mengetahui makna SIMDA Keuangan, terlihat dari pemahaman mereka mengenai pengertian dan tujuan serta input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan dari hasil pengolahannya. *(Lihat Lampiran Hasil Wawancara)*

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harmadhani Asdi Nugraha dan Yuli Widi Astuti (2013) yang menunjukkan bahwa pegawai telah memahami dan mengetahui aplikasi SIMDA Keuangan yang merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang secara terintegrasi mengelola keuangan pemerintah daerah dari proses input sampai dengan output yang dihasilkan. Mitami Dian M (2013), yang menunjukkan bahwa secara umum pegawai DPKA pangkep sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya.

## **2. Faktor-faktor Pendukung yang Dimiliki oleh BPKAD Kota Makassar dalam Penerapan SIMDA Keuangan**

Penerapan SIMDA Keuangan yang dilakukan oleh Pemda Kota Makassar tentunya tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukungnya. Dari hasil Penelitian, berbagai faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Makassar adalah sebagai berikut :

### **2.1 Komunikasi**

George C. Edward (2011:90-92) menyatakan bahwa komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (2010), dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan

kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/program tercapai.

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Kejelasan ukuran dan tujuan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Komunikasi antar pimpinan dan staff pada BPKAD Kota Makassar mengenai penerapan SIMDA Keuangan cukup baik. Menunjukkan bahwa komunikasi telah aktif dilaksanakan. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keaktifan para pegawai untuk menggali sumber informasi yang memadai baik melalui diskusi ataupun tukar pikiran.

Gambaran komunikasi antar pimpinan dan staff pada BPKAD Kota Makassar dibutuhkan sosialisai penerapan SIMDA Keuangan dengan adanya komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan dan pengoperasian SIMDA Keuangan lewat diskusi dengan kepala kantor dan pegawai yang bertugas secara tukar pikiran tentang penerapan SIMDA Keuangan.

Informasi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan diantaranya yaitu komunikasi yang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal pada BPKAD Kota Makassar didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif baik dari atasan

kepada pegawai maupun antar pegawai. (*Lihat Lampiran Hasil Wawancara*)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi dilakukan sebelum penerapan SIMDA dengan pegawai dan dilakukannya diskusi-diskusi antar SKPD.

## **2.2 Sumber Daya Manusia**

George C. Edward (2011:90-92) menyatakan bahwa sumberdaya manusia, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Faktor penting lain yang merupakan penentu keberhasilan penerapan suatu kebijakan yaitu upaya pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu berbagai upaya telah ditempuh oleh BPKAD Kota Makassar guna meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan SDM yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan yaitu meningkatkan kualitas SDM khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan dan dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa keahlian dari para pelaksana menjadi salah satu komponen penting sumber daya untuk penerapan kebijakan, olehnya itu jika jumlah staff pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan

kemampuan/keterampilan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan.

*(Lihat Lampiran Hasil Wawancara)*

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan SDM melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM terhadap SIMDA Keuangan.

### **2.3 Disposisi/Sikap**

George C. Edward (2011:90-92) menyatakan bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (2010), disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu : 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, 3) Intentionalitas disposisi implementor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap implementor. Dalam hal disposisi/sikap ini, ditemukan adanya respon yang baik dari para pelaksana karena mereka sadar bahwa penerapan SIMDA Keuangan akan membawa

dampak yang baik sehingga mereka setuju untuk menerapkan SIMDA Keuangan karena sistem ini sangat membantu mereka dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan di BPKAD cukup baik sehingga penerapannya dapat terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

Disamping itu, untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal, implementor juga perlu mengetahui alasan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Kebijakan ini diatur dalam peraturan pemerintah, dimana pegawai berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa selain sikap pegawai yang menerima dan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dan senang hati selaku pelaksana kebijakan, komitmen kepala kantor/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam mencapai optimalisasi penerapan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Makassar. (*Lihat Lampiran Hasil Wawancara*)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena dapat mempercepat proses pelaporan keuangan, setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena bisa menyiapkan segala fasilitas mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan,

setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena aplikasinya tidak rumit dan mudah pemeliharaannya, setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena sangat membantu, dapat mengefektifkan waktu dan mengefesiensikan biaya.

## **2.4 Struktur Birokrasi**

George C. Edward (2011:90-92) menyatakan bahwa struktur birokrasi yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. Pengawasan pada BPKAD Kota Makassar tidak terlalu ditekankan, akan tetapi pegawai harus mengontrol sistem jika ada yang eror dan selalu berkordinasi pada pihak penyedia SIMDA Keuangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan tidak terlalu ditekankan, namun harus mengontrol sistemnya dan berkordinasi pada pihak penyedia SIMDA

Keuangan agar pengelolaan laporan keuangan berjalan dengan lancar.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengawasan atas penerapan SIMDA Keuangan maka dibutuhkan pengalaman pegawai tentang kegagalan sistem yang pernah terjadi. Selama ini pegawai tidak pernah mengalami kegagalan dalam sistem saat mengelola laporan keuangan.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam sistemnya tidak pernah mengalami kegagalan sistem, itu membuktikan bahwa pengawasan di BPKAD Kota Makassar cukup baik. (*Lihat Lampiran Hasil Wawancara*)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haryati Saleh Ramesa (2015) yang menyatakan bahwa terdapat struktur birokrasi yang baik khususnya khususnya terhadap pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan terhadap SIMDA Keuangan, dan adanya pengadaan server cadangan untuk mengantisipasi kegagalan yang disebabkan oleh sistem.

### **3. Kualitas Informasi yang Dihasilkan dari Penerapan SIMDA Keuangan**

Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal. Dari hasil penelitian pada BPKAD Kota Makassar, ditemukan beberapa kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

- a) **Akurasi**, dalam penggunaan SIMDA Keuangan tidak pernah ada keluhan tentang sistem.
- b) **Ketetapan Waktu**, dengan adanya SIMDA Keuangan, pegawai terbantu karena penyajian laporan keuangan tidak pernah terhambat dan mengefesienkan waktu.
- c) **Relevan**, SIMDA Keuangan sangat relevan karena data sudah terprogram langsung dalam sistem.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan defenisi kualitas informasi dari ketiga karakteristik diatas yang berarti akurasi, ketepatan waktu dan relevan. Ungkapan hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Makassar sudah cukup baik. Dengan adanya sistem ini sangat membantu pegawai dalam proses penyajian laporan keuangan, karena penyajian laporan keuangan tidak pernah terhambat dan sangat mengefesienkan waktu, hal ini membuktikan bahwa sistem ini telah bekerja dengan baik. (*Lihat Lampiran Hasil Wawancara*)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Halens Ryanlie Ole (2014), yang menunjukkan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan menghasilkan informasi dengan ketetapan waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Haryati Saleh Ramesa (2015), yang menyatakan bahwa Akurasi yang dihasilkan dalam penggunaan SIMDA Keuangan dapat diandalkan karena setiap laporan yang di transfer ke pengguna informasi tidak pernah mengalami keluhan semenjak diterapkannya SIMDA Keuangan, Informasi yang dihasilkan

dalam penggunaan SIMDA Keuangan selalu tepat waktu karena tingkat kegagalan pada sistem dapat diminimalisir sehingga penyajian laporan keuangan tepat pada waktunya, informasi yang dihasilkan dalam penggunaan SIMDA Keuangan relevan atau sangat bermanfaat bagi pengguna karena disajikan akurat dan tepat waktu serta semua laporan yang dibutuhkan semua ada di SIMDA Keuangan. Harmadani Adi Nugraha dan Yuli Widi Astuti (2013) yang menyatakan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari pada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual.

#### **4. Efektifitas Penerapan SIMDA Keuangan**

SIMDA Keuangan adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data keuangan pada pemerintah daerah. Secara umum pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian SIMDA Keuangan pada BPKAD Kota Makassar telah mengerti dan paham tentang tujuan dan penerapan SIMDA Keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pegawai merasa terbantu dengan adanya sistem ini dan bisa dikatakan sistem ini efektif dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa sudah sangat efektif.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan SIMDA Keuangan pada BPKA Kota Makassar sangat efektif. (*Lihat Lampiran Hasil Wawancara*)

Hasil ini mendukung penelitian dari Aulia Lorie Pangestika dan Yeni Priatna Sari (2016), bahwa SIMDA adalah sebuah aplikasi komputer untuk mengolah keuangan daerah, SIMDA membuat pengelolaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih efektif, tidak perlu diulang untuk pembuatan laporan keuangan, kita tinggal input lalu SIMDA bekerja secara otomatis itu lebih memudahkan pegawai dalam pengoperasian SIMDA Keuangan. P.Ayu Ratnah Dewi (2014), bahwa tingkat efektifitas penerapan SIMDA di Pemerintah Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Yogi Hertanto, Tjahjanulin Domai, dan Fadillah Amin (2016) bahwa SIMDA Keuangan telah terlaksana dengan baik dan pelaksanaan SIMDA Keuangan di Kabupaten Blitar telah berjalan secara efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan pada BPKAD Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektifitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan telah berjalan sangat efektif. Dapat dilihat dari pegawai di BPKAD Kota Makassar sudah memahami makna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan pemerintah daerah. SIMDA Keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal menginput data pada sistem, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Adapun faktor-faktor pendukung dari penerapan SIMDA Keuangan yang dimiliki oleh BPKAD Kota Makassar, yaitu :

1. Komunikasi, untuk penerapan SIMDA Keuangan yang optimal didukung oleh adanya komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut. Komunikasi dilakukan baik dari atasan kepada pegawai maupun antar sesama pegawai bersangkutan.
2. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kota Makassar sangat mendukung proses penerapan SIMDA Keuangan dan pelaksanaan program-program pelatihan rutin untuk peningkatan kualitas SDM, seperti pelatihan SIMDA, pendampingan dan diklat SIMDA.

3. Sikap pegawai yang menerima dan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik dan senang hati serta dukungan dari pimpinan.
4. Struktur birokrasi yang berperan dalam pengawasan atas jalannya sistem aplikasi komputerisasi SIMDA Keuangan.

Kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan, yaitu :

1. Akurasi, tidak pernah ada keluhan tentang sistem ini, hal ini membuktikan bahwa informasi yang dihasilkan dari pengolahan data pada sistem dapat diandalkan.
2. Ketetapan Waktu, penerapan SIMDA Keuangan sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Relevan, sistem bekerja secara otomatis.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka efektifitas penerapan SIMDA Keuangan pada organisasi/instansi untuk menerapkan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangannya yaitu perlu pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor pendukung apa yang perlu dimiliki oleh setiap instansi untuk dapat menerapkan SIMDA Keuangan seperti yang dimiliki oleh BPKAD Kota Makassar baik dalam hal komunikasi, pengembangan sumber daya manusia dan yang paling penting adalah sikap dari para implementor serta komitmen pemimpin dan pengawasan. Hal ini

yang turut mendukung penerapan SIMDA Keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan efektif, laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu serta dapat diandalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deisi, Natalia Lumintang. 2015. Analisis Penerapan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.
- Edward, George C. 2011. *Implementing Public Policy*, Washington
- Erwin. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Maluku Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Khairun.
- Hartono Bambang. 2013, Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta
- Hertano, Yogi, Dkk. 2016. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektifitas Pelaporan Keuangan. Malang: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.1 no.2
- Jogiyanto. 2011. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Kumorotomo. 2010. Sistem Informasi Sektor publik. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Lorie Aulia Pangestika, dkk. 2016. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Politeknik Harapan Bersama Tegal
- Mardiasmo. 2011. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mcleod, Raymod. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyanto Agus. 2010. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Niftahusadah. 2010. Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dan sesudah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Bandung.
- Nugroho, Eko. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Permendagri 13 tentang Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ratna,P.Ayu Dewi. 2014. Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKAD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Ridwan. 2009. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Inramayu. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Saleh Haryati Ramesa. 2015. Analisis Factor-Faktor Pendukung Dan Kualitas Informasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Kendari. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. Bimbingan Teknis SIMDA keuangan. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- Satgas Pengembangan SIMDA 2008. SIMDA dan Penerapannya. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
- Slameto. 2010. Belajar dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka cipta.
- Subarsono. 2011. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. 2015. Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Milik Daerah. Surakarta: Jurnal Akuntansi. Vol.13, no.2
- Sutarman, Edhy. 2012. Sistem informasi manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutanto, Azhar. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Linggar Jaya.
- Ulfati, Nur. 2011. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

## DAFTAR PERTANYAAN

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN

#### SIMDA KEUANGAN :

1. Pemahaman saudara/ i tentang SIMDA Keuangan ?

Jawab :

“Menurut saya dek, SIMDA Keuangan itu suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, Kapanjangan SIMDA itu (Sistem Informasi manajemen daerah) yang membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.”

2. Menurut saudara/ i tujuang Penerapan SIMDA Keuangan ?

Jawab :

“Tujuan sebenarnya untuk bagaimana memfasilitasi kita pemda itu menuangkan laporan keuangan untuk lebih cepat dalam penyusunannya karena dengan transaksi yang banyakitu akan dibantu dengan adanya SIMDA.”

3. Bagaimana proses pelaksanaan kerja SIMDA Keuangan, bisa dijelaskan dari tahap proses penginputan sampai pada tahap menghasilkan output.

Jawab :

“Disini kami membuat jurnal dan laporan keuangan, jurnal (input) merupakan dasar pembuatan laporan keuangan. Adapun (output), yang dihasilkan contohnya seperti, RKA (rencana kerja anggaran), DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (surat penyedia dana). Output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan output yang diinginkan.

#### KOMUNIKASI :

4. Bagaimana komunikasi antara pimpinan dan staf mengenai penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini ?

Jawab :

“Pimpinan hanya memberikan intruksi dan sosialisai proses untuk menjalankan SIMDA, kita sebagai staff mempelajari bagaimana pengoperasiannya dapatdijalankan.

5. Bagaimana sosialisasi penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini khususnya kepada Staff ?

Jawab :

“Sebenarnya dari dulu komunikasi dan sosialisasi tentang penerapan dan pengoperasian SIMDA Keuangan itu sudah ada, Cuma bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung, yah contohnya lewat diskusi sama kepala kantor dan pegawai yang bertugas pada bagian yang sama atau kadang-kadang juga sering bertukar pikiran tentang penerapan SIMDA Keuangan itu.

#### **SUMBER DAYA MANUSIA :**

6. Bagaimana peningkatan kualitas SDM khususnya dalam proses pengoperasian SIMDA Keuangan di Kantor ini ?

Jawab :

“Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas SDM disini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan penelitian khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP.

#### **DISPOSISI/SIKAP :**

7. Bagaimana respon pegawai atas penerapan SIMDA Keuangan ?

Jawab :

“Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon bagus penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefesienkan waktu, pokoknya sangat membantu lah.

8. Menurut Saudara/i untuk apa kebijakan penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini dibuat ?

Jawab :

“Kebijakan ini kan diatur dalam peraturan pemerintah, dimana kita berkewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Disini kita merasa perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan peraturan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kita.

## **STRUKTUR BIROKRASI/PENGAWASAN :**

9. Menurut saudara/i bagaimana tingkat pengawasan dalam proses pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini ?

Jawab :

“Kalau pengawasan sih, tidak terlalu ditekankan cuman kita harus mengontrol apakah ada eror dalam sistemnya, kita juga harus berkordinasi pada pihak penyedia SIMDA.

10. Apakah SIMDA Keuangan di Kantor ini pernah mengalami kegagalan sistem ?

Jawab :

“Alhamdulillah, Sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan kegagalan sistem, bahkan lancar.

## **KUALITAS INFORMASI :**

11. Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini khususnya Akurasi, Ketepatan Waktu dan Relevan.

Jawab :

**a) Akurasi**

“Yahhh, sejauh ini tidak pernah ada keluhan tentang sistem ini”

**b) Ketetapan Waktu**

“Setelah diterapkannya SIMDA Keuangan, kami merasa terbantu dengan adanya sistem ini, karena penyajian laporan tidak pernah terhambat dan sangat mengefesienkan waktu”

**c) Relevan**

“Sudah jelas dek, karena data sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data kedalam sistem dan sistem yang mengolahnya.

## **EFEKTIFITAS :**

12. Menurut saudara/i apakah penerapan SIMDA Keuangan di Kantor ini sudah efektif atau tidak, mohon dijelaskan.

Jawab :

“Sudah sangat efektif dek, seperti yang dijelaskan tadi dengan adanya SIMDA Keuangan penyajian laporan keuangan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI FOTO





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 14 Mei 2018

Kepada

Nomor : 0701/354-II/BKBP/VI/2018  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5971/S.01/PTSP/05/2018 Tanggal 11 Mei 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **ERMAWATI**  
NIM/ Jurusan : 10573 0483514 / Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar  
Judul : **"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDAO UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **14 Mei s/d 12 Juli 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
U. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP**

Pangkat Pembina

NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 8 0 5 8

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5971/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : izin Penelitian

KepadaYth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 782/Izn-5/C.4-VIII/V/37/2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ERMAWATI**  
Nomor Pokok : 10573 0483514  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA0 UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 12 Juli 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 11 Mei 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. Jend Ahmad Yani No.2, Makassar – Telp. (0411) 3633700-3615450, Facs ((0411) 3633700  
M A K A S S A R 90111



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 000.03/471/BPKAD/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamim, SE.,M.Ak

Jabatan : Kepala Sub-Bidang Pembukuan

Menerangkan bahwa Mahasiswafi Perguruan Tinggi yang bernama:

Nama : Ermawati

NIM : 10573 0483514

Jurusan : Akuntansi

Perguruan Tinggi : UNISMUH MAKASSAR

Benar telah melakukan penelitan / pengumpulan data pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : ***"Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar"***.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Juli 2018  
Kepala Sub-bidang Pembukuan  
BPKAD Kota Makassar,



**Hamim, SE.,M.Ak**  
NIP. 19830424 200909 1 001

## RIWAYAT HIDUP



**Ermawati** adalah Nama penulis kripsi ini. Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Oktober tahun 1996 sebagai putri pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Iskandar dan Ibu Juharti. Masa pendidikan penulis dimulai dari SDN 091 Bone Masamba pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Masamba pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah SWT, dan dengan ketekunan motivasi tinggi dari keluarga dan sahabat untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi ini yang berjudul **“Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar.”**